

China dan Politik Penanganan Pandemi Covid-19

Arif Wicaksa¹

¹Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman (arif.wicaksa@fisip.unmul.ac.id)

Submitted: 27 Juni 2021; accepted: 20 November 2021

ABSTRACT

China is the first country reported to be a developing place for Coronavirus or Covid-19, which is currently a global pandemic. However, China also had been known as a rising country, a new world economic power. By using the concept of Disaster Capitalism and qualitative analysis, this paper seeks to illustrate the Chinese interest based on the policies taken regarding the Covid-19 Pandemic. It was found that Chinese policy regarding the Covid-19 Pandemic was an instrument used to achieve its national interest. The policy to coverage media related to Covid-19, then the policy of providing humanitarian assistance to the Chinese trading partner countries and the policy to regain Hong Kong in the middle of the Covid-19 Pandemic.

Keywords: *China, Covid-19, Disaster Capitalism, Policy.*

ABSTRAK

China merupakan Negara pertama yang dilaporkan menjadi tempat berkembangnya Coronavirus atau Covid-19 yang saat ini menjadi pandemic global. Sebelum itu, China telah dikenal pula sebagai Negara yang bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Dengan menggunakan konsep Kapitalisasi Bencana dan analisis kualitatif, tulisan ini berusaha menggambarkan kepentingan China dari kebijakan-kebijakan yang diambil terkait Pandemi Covid-19. Ditemukan bahwa kebijakan China terkait Pandemi Covid-19 merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan menutupi pemberitaan media terkait Covid-19, kemudian kebijakan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Negara mitra dagang China hingga kebijakan untuk penguasaan kembali Hong Kong ditengah Pandemi Covid-19

Kata Kunci: **China, Covid-19, Kapitalisasi Bencana, Kebijakan.**

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 atau yang juga dikenal dengan nama Virus Corona menjadi fenomena global yang meresahkan masyarakat dunia pada tahun 2020. Pandemi tersebut telah menjadi bencana global yang rasanya sulit untuk dilupakan dari sejarah kehidupan umat manusia karena betapa

berbahayanya virus ini dan betapa luas dan cepatnya penularannya.

Republik Rakyat China/Tiongkok (Untuk selanjutnya disebut China saja) merupakan negara yang pertama menjadi korban keganasan virus ini. Disebutkan bahwa Kota Wuhan di China menjadi kota pertama tempat penyebaran dan merebaknya virus ini. Secara tidak Lang sung terindikasi bahwa

China merupakan Negara pertama yang diketahui sebagai Negara yang terjangkiti oleh Pandemi Covid-19.

Fakta bahwa kasus Covid-19 pertama kali ditemukan pada wilayah China merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi China sebagai negara. Permasalahan rumor yang mengatakan bahwa virus tersebut merupakan rekayasa dari Pemerintah China, senjata biologis yang dikembangkan Pemerintah China, dll merupakan hal serius yang bisa berdampak buruk terhadap citra China dalam politik internasional.

Memburuknya citra China dalam masa pandemi semakin diperparah dengan pernyataan-pernyataan kontroversial mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump ketika menjabat sebagai presiden. Bahwa Virus Corona, atau Covid-19 adalah "Virus China". Pernyataan yang dilontarkan oleh pemimpin negara adidaya, yang sekaligus merupakan "rival" bagi China dalam politik internasional jelas menjadi hal yang problematis bagi China.

Pada sisi lain, dalam skala global, citra China sebagai sebuah negara mendapat kesan buruk dengan berbagai macam kasus yang membawa nama China dan Pemerintah China khususnya. Sebut saja permasalahan kemanusiaan di daerah Xinjiang terhadap etnis Uyghur, permasalahan kemerdekaan Hong Kong, hingga persoalan reunifikasi dengan Taiwan. Persoalan-persoalan tersebut pada hakikatnya menjadi batu-batu sandungan bagi China untuk mewujudkan citra China sebagai negara yang bangkit dengan perdamaian, atau "Peaceful Rise".

Tuduhan terhadap China sebagai negara asal pandemi, bahkan "pencipta pandemi", ditambah dengan isu-isu besar lainnya, bisa menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah China untuk memanfaatkan momentum pandemi sebagai titik balik untuk memperbaiki citranya sebagai negara, dan bahkan lebih jauh lagi, mencapai kepentingan nasionalnya.

Sebagaimana bencana pada umumnya, Pandemi Covid-19 yang juga merupakan bencana tidak bisa semata-mata dipandang sebagai fenomena alam yang dibiarkan begitu

saja seolah tidak memiliki makna. Sebaliknya, Pandemi Covid-19 merupakan fenomena sekaligus arena politik global bagi para aktor-aktor politik internasional.

Perlu diketahui disini, maksud penulis menyatakan Pandemi Covid-19 sebagai fenomena politik bukan berarti menganggap Pandemi Covid-19 sebagai hal yang disengaja diciptakan oleh oknum atau organisasi tertentu untuk tujuan tertentu sebagaimana anggapan-anggapan terkait konspirasi politik dunia. Penulis tidak bermaksud menguraikan hal itu pada tulisan ini.

Tujuan penulis dalam tulisan ini adalah hendak menggambarkan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh China terkait dengan Pandemi Covid-19 sehingga dampak dari pandemi tersebut tidak begitu merugikan China atau bahkan China bisa menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk meningkatkan kuasa (power) dalam dinamika politik internasional.

Pada hakikatnya, bencana secara umum merupakan fenomena alam yang terjadi secara natural di bumi dan merupakan fenomena yang sejauh ini bukan merupakan hal yang bisa dicegah oleh manusia. Sejalan ini, pengetahuan dan teknologi terkait dengan bencana berada pada tahapan peringatan sebelum terjadinya bencana dan penanganan pasca terjadinya bencana. Khususnya pada bencana-bencana yang berkaitan dengan gejala-gejala alam seperti gempa bumi, angin topan, tsunami dll. Bisa dikatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengintervensi pada fase-fase meringankan dampak yang diakibatkan oleh bencana.

Politik dan kebijakan kebencanaan pada hakikatnya adalah proses politik untuk meringankan dampak yang diakibatkan oleh bencana. Pandemi Covid-19 sebagai bencana global juga tidak bisa dilepaskan dari politik dan kebijakan bencana yang dilakukan oleh aktor politik seperti China.

Tentu saja label yang disematkan pada China tidak sesuai dengan citra China sebagai Negara yang disebut sebagai kekuatan ekonomi dunia baru yang digadang menjadi saingan bagi kekuatan Amerika Serikat. Dengan momentum Pandemi Covid-19,

diketahui bahwa China telah mengambil berbagai langkah-langkah kebijakan strategis baik dalam maupun luar negeri untuk menghadapi pandemi tersebut. Langkah strategis yang diambil oleh China tentunya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politis yang melatar belakangi persoalan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang penulis sebutkan diatas, dapat diketahui bahwa China merupakan Negara yang terkena dampak pertama akibat Pandemi Covid-19. Selain kerugian jiwa dan materi, terdapat kerugian politik yang dialami China karena pandemi yang terjadi. Maka dari itu, adalah penting untuk mengetahui bagaimana langkah yang diambil oleh China dalam merespon kerugian yang hadir bersama Pandemi Covid-19. Tulisan ini berusaha membangun argumen mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang kebijakan luar negeri China terkait penanganan Pandemi Covid-19 dalam skala internasional. Argumen yang akan dibangun akan terkait bagaimana kebijakan-kebijakan luar negeri China dalam penanganan Pandemi Covid-19 memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional China sebagai negara adidaya baru dalam politik internasional.

TINJAUAN LITERATUR

Kebangkitan China sebagai Negara dengan kekuatan ekonomi besar menjadi fenomena global yang kuat pasca berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Peningkatan kekuatan ekonomi China mengalami perubahan yang sangat pesat pada abad ke 21 ini. China yang pada awalnya merupakan Negara yang dilanda kelaparan hebat dibawah kepemimpinan Mao Zedong, kemudian berubah menjadi Negara pendonor bantuan-bantuan luar negeri pada Negara lain sebagaimana posisi Negara-negara pendonor dari barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya.

Ambisi China menjadi Negara adidaya tercermin dari kebijakan “Belt and Road Initiative” yang dibanggakan oleh Pemerintah China dengan tujuan menjadikan China sebagai pusat ekonomi dan perdagangan internasional. Kebangkitan ekonomi China tidak selamanya membawa reaksi positif bagi

Negara lain terutama Negara yang memiliki hubungan yang tidak begitu harmonis dengan China karena berbagai permasalahan seperti sengketa teritorial hingga pertarungan pengaruh global.

Seolah menyadari sikap Negara lain yang mengamati kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi dunia yang baru, China kemudian menggagas konsep “Peaceful Rise” atau “Kebangkitan yang Damai”. Konsep tersebut pada hakikatnya adalah bentuk upaya China dalam mencitrakan negaranya sekaligus menghadirkan Negara China sebagai Negara yang kuat namun sangat cinta pada perdamaian sehingga Negara lain yang berhubungan dengan China tidak perlu untuk merasa terancam atas kebangkitan China. (He dan Feng, 2014)

Kebangkitan China yang “damai” dituangkan dalam berbagai kebijakan luar negeri, termasuk didalamnya dalam persoalan kemanusiaan. Selama ini, persoalan kemanusiaan secara konvensional merupakan arena dimana pelakunya adalah Negara-negara barat. Bahkan China tercatat sebagai salah satu Negara donor kemanusiaan terbesar didunia. (Mac Ginty dan Peterson, 2015)

Salah satu persoalan kemanusiaan dimana China berusaha membangun kuasanya adalah persoalan kesehatan. Perlu diketahui bahwa Pandemi Covid-19 bukanlah pandemi pertama yang menyeret nama China kedalam daftar Negara yang diduga bertanggung jawab. Sebelum Covid-19, China dan dunia juga sempat dihebohkan dengan Virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Meskipun kasus SARS tidak seluas Covid-19, namun SARS mampu menjadi momentum bagi Negara-negara didunia untuk meninjau kembali tatanan pemerintahan dan institusi global terutama yang berkaitan dengan kesehatan. (He dan Feng, 2014)

Dalam hubungan internasional, system Westphalia telah sangat mengakar kuat membentuk pola hubungan internasional hingga pembentukan institusi global. Namun, sistem Westphalia adalah tatanan yang sangat berfokus pada barat khususnya peradaban Eropa. Hal tersebut menjadikan pola interaksi Negara, pembentukan institusi dan rezim

internasional sangat kental dengan warna Eropa. Kebangkitan China yang merupakan Negara bukan barat dan bukan pula Eropa menjadikan tatanan dunia yang dibangun diatas sistem Westphalia seolah harus ditinjau kembali.

Lee dan Chan (2014) berargumen bahwa China sebagai Negara yang memiliki perkembangan ekonomi sangat pesat pada abad 21 akan sulit untuk pro terhadap *status quo* dari sistem internasional yang saat ini terbentuk maupun rezim-rezim internasional yang saat ini berlaku. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila Negara kekuatan baru tergabung kedalam sistem internasional, maka Negara tersebut akan berusaha membentuk sistem internasional tersebut yang sebelumnya tidak mereka bentuk dan sebelumnya tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Momen Pandemi SARS telah menjadi momentum bagi China untuk berusaha mengupayakan peningkatan peran dalam rezim kesehatan global. Diantara upaya yang dilakukan oleh China adalah dengan terlibat jauh kedalam kesepakatan TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights). Kesepakatan ini mengatur mengenai hak kekayaan intelektual dan perdagangan yang berkaitan dengannya. TRIPS pada hakikatnya merupakan rezim yang berada dibawah naungan WTO (World Trade Organization) namun ternyata TRIPS juga memiliki kaitan dengan WHO (World Health Organization). Yakni pada hak cipta dan hak kekayaan intelektual dalam urusan medis dan farmasi.

Dibawah naungan TRIPS, perusahaan farmasi memiliki hak untuk monopoli hak cipta dan hak intelektualnya selama 20 tahun meskipun terdapat aturan yang masih memungkinkan Negara untuk “mewajibkan” perusahaan farmasi untuk tidak memonopoli hak ciptanya dibawah payung Artikel 31(f) TRIPS. Terkait permasalahan ini, China menyatakan diri sebagai aktor yang akan menjembatani antara Negara berkembang dan Negara maju dalam persoalan hak cipta produk medis dan farmasi. Sikap tersebut disampaikan China pada masa-masa awal

China bergabung sebagai Negara anggota WTO pada 2001. (Lee dan Chan, 2014)

Lebih jauh lagi, menurut Lee dan Chan (2014) kebijakan China untuk menjembatani Negara berkembang dan Negara maju dalam TRIPS hanyalah dukungan verbal saja dan tidak terlihat perubahan sikap China dalam mengambil sikap untuk mengubah atau merevisi kesepakatan TRIPS.

Lantas kemudian bagaimana kepentingan China bisa terpenuhi jika China pada kenyataannya tidak memberikan perubahan yang berarti pada kesepakatan TRIPS? Menurut Lee dan Chan (2014) hal tersebut karena kepentingan China adalah dengan tidak mengubah kesepakatan TRIPS itu sendiri. Hal ini dikarenakan China punya usaha domestik untuk meningkatkan industri farmasinya sendiri dan kesepakatan TRIPS memungkinkan China untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pada sisi lain, China juga belum mau menantang rezim kesehatan global yang saat ini berjalan karena China juga membutuhkan transfer teknologi dan investasi untuk meningkatkan ekonominya secara umum dan khususnya untuk meningkatkan kemampuan industri farmasinya. Bisa dikatakan dalam kasus kepentingan China dalam rezim kesehatan global adalah berusaha menarik investasi dan teknologi untuk peningkatan kualitas industri farmasi domestiknya, namun pada sisi lain secara verbal menyatakan dukungannya pada Negara berkembang yang cukup direpotkan dengan adanya kesepakatan TRIPS dimana sektor medis dan farmasi dimonopoli oleh pemegang hak cipta dan Negara asalnya.

METODE RISET

Tulisan ini merupakan hasil riset yang bersifat deskriptif. Penulis berusaha menggambarkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah China terkait dengan Pandemi Covid-19. Data yang penulis ambil adalah data primer yang berasal dari sumber-sumber resmi pemerintahan, berikut pula data sekunder yakni data yang telah diolah oleh penulis lain dan dituangkan dalam bentuk jurnal, buku, dan publikasi lainnya. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan

adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topik tulisan. Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik kualitatif yang berusaha mencari pemaknaan dari simbol, fenomena, dan gejala politik dalam topik penelitian yakni kepentingan China dalam penanganan Pandemi Covid-19 yang kemudian penulis sajikan dalam bentuk non-numerik.

KERANGKA ANALISIS

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep “Disaster Capitalism” atau “Kapitalisasi Bencana” yang digagas oleh Naomi Klein. Secara ringkas, Klein (2007) menyatakan bahwa Kapitalisasi Bencana adalah strategi, kebijakan yang teratur kepada ruang-ruang publik dalam momentum bencana dan krisis yang kemudian dikombinasikan dengan perlakuan bencana sebagai pasar yang menarik.

Berdasarkan definisi kapitalisasi bencana oleh Klein, dapat dipahami bahwa bencana meskipun pada hakikatnya adalah sesuatu yang merugikan, bukan berarti dari bencana tidak dapat memberikan keuntungan bagi aktor-aktor politik tanpa terkecuali China.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, China terindikasi mengarahkan kebijakannya untuk pembangunan nasionalnya terutama dari sector industri farmasi. Kebijakan yang diambil China pada hakikatnya parallel dengan asumsi realisme dalam hubungan internasional.

Realisme percaya bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional adalah untuk kepentingan nasionalnya. Mengenai Negara lain, tidaklah dapat dijadikan tempat untuk bergantung sehingga setiap Negara harus mampu untuk menggunakan setiap instrument yang ada sebagai alat untuk meningkatkan kuasa (power) yang dimilikinya. Hal tersebutlah yang secara historis-empiris tergambar dalam kebijakan China.

Berdasarkan hal tersebut, maka apakah pada kasus Pandemi Covid-19 ini China dapat dikatakan melakukan kebijakan yang oleh Naomi Klein disebut sebagai Kapitalisasi Bencana? Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan berusaha menjelaskan hal tersebut.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19, Media, dan Supremasi Partai Komunis China

Dengan merujuk pada kerangka analisis yakni kapitalisasi bencana, maka penulis akan berusaha menggambarkan kebijakan-kebijakan China terkait Pandemi Covid-19 dan apa yang didapatkan China dari kebijakan yang diambilnya tersebut.

Pada masa awal-awal penyebaran virus Corona (Covid-19) di wilayah Wuhan, China, Pemerintah China mengambil sikap untuk menutup-nutupi informasi terkait Covid-19 tersebut (Huaying, 2020). Ditengah kemunculan bencana pada tahap awal tersebut, kebijakan yang diambil Pemerintah China adalah dengan berusaha menjauhkan salah satu sector ekonomi nasional dari kerugian dan sector tersebut adalah sector pariwisata. Kebijakan China untuk menutupi perkembangan dan penyebaran awal Covid-19 dapat terlihat dari usaha Pemerintah China untuk menekan dan menyensor berita-berita yang bisa mengarahkan pada tersebarnya Covid-19. (Chen, Huang dan Li, 2020)

Masih terkait dengan berita mengenai Pandemi Covid-19 di China, jika pada tahap awal penyebaran Covid-19 Pemerintah China seolah berusaha menutupi kasus ini, maka ketika Covid-19 menjadi fenomena internasional, maka terjadi perubahan kebijakan Pemerintah China. Pemerintah tidak lagi menutupi bahwa Covid-19 terjadi dan menyebar di China. Kebalikannya yang terjadi adalah media China sudah banyak memberitakan perkembangan Pandemi Covid-19 di China. Pada sisi lain, media juga mejadi instrument untuk menyampaikan kebijakan yang diambil China diantaranya untuk mensosialisasikan sikap Pemerintah China yang berdasarkan pemberitaan media China merupakan pemerintahan yang

mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat. Pemberitaan media terhadap kebijakan Pemerintah China tersebut merupakan salah satu tema yang paling sering muncul dalam pemberitaan media China pada masa awal tahun 2020. (Chen, Huang dan Li, 2020)

Pandemi Covid-19 terjadi pada masa dimana hubungan antara China dan Amerika Serikat sedang dalam kondisi yang kurang harmonis. Hal ini berdampak pada berbagai hal. Misalnya Pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Trump pernah menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 adalah “Virus China” dan tentu saja pernyataan ini adalah pernyataan yang merugikan bagi China karena nama China diasosiasikan sebagai bencana dan lebih jauh lagi, pernyataan Presiden Trump seolah mengisyaratkan bahwa China adalah penyebab permasalahan Covid-19. (Carter dan May, 2020) Pernyataan Presiden Trump merupakan respon dari pernyataan seorang politisi China yang bernama Zhao Lijian yang menyatakan bahwa Covid-19 adalah konspirasi dan kesengajaan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Kasus Virus China dan Konspirasi Amerika ini pada akhirnya menyeret kedua Negara ini dalam kondisi yang tidak baik dan lebih kaku dari sebelumnya. (Huaying, 2020).

Pertentangan antara China dan Amerika Serikat pada hakikatnya telah terjadi sebelum Pandemi Covid-19 terjadi dan pertentangan yang ada secara hakikatnya terjadi pada level yang sangat mendasar yakni ideologis. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa China adalah salah satu Negara pengusung ideologi Sosialisme-Komunisme di dunia dan Amerika Serikat sendiri adalah Negara yang dikenal karena nilai-nilai Liberalisme-Kapitalisme yang menjadi ideologi negaranya.

Momen Pandemi Covid-19 ternyata memberikan dampak yang positif bagi sistem Sosialisme-Komunisme di China. Pemerintahan yang terpusat dan control ketat terhadap masyarakat di China memungkinkan Pemerintah China untuk memaksa rakyat China untuk menjalani kebijakan “lockdown” yang rakyat dilarang untuk keluar rumah dan wilayah yang terinfeksi ditutup aksesnya.

Kemampuan pemerintah untuk “memaksa” inilah yang sepertinya sulit diterapkan di Amerika Serikat yang beerhaluan Liberalis-Kapitalis. Hal ini terbukti dari menurunnya jumlah korban Covid-19 di China dan sebaliknya meningkatnya jumlah korban Covid-19 di Amerika Serikat. (Biswas dan Guan, 2020).

Pandemi Covid-19 seolah menjadi momen bagi China untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengatur rakyatnya guna menekan perkembangan dan perluasan penyebaran Covid-19 melalui sistem pemerintahan komunisnya yang sentralistik.

Meskipun secara ideologis, sistem Komunisme China menunjukkan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan domestik menanggulangi Covid-19, tidak berarti citra China langsung pulih. Pada kenyataannya, banyak pihak yang menuntut China atas “keteledorannya” dalam menangani Covid-19 terutama dalam masa-masa awal penyebarannya dimana China dianggap menutup-nutupi informasi. (Huaying, 2020)

Penguatan Kerjasama dan Bantuan Bagi Negara Terdampak Pandemi Covid-19

Sikap Negara-negara dunia yang menuding Pandemi Covid-19 sebagai kesalahan China pada akhirnya menjadikan China memberikan bantuan pada Negara-negara yang terutama menjadi rekan perdagangannya, seperti Negara-negara di Benua Afrika, negara-negara Asia Tenggara sebagai negara dimana pengaruh China secara politik sangat menguat secara signifikan terutama pada abad 21 ini. Adapun besaran bantuan yang diberikan China, pada beberapa kasus tidak dipublikasikan seperti bantuan China pada Negara-negara Afrika (Li dan Musiitwa, 2020). Meskipun demikian, Pemerintah China melalui Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa China telah menyediakan dana sekitar 2 Milyar US\$ untuk bantuan penanganan Covid-19 dan menjadikan China sebagai ibukota dari respon humanitarianisme global. (Fletcher, 2020)

Namun bantuan dari China ini justru ditanggapi negatif oleh Negara-negara Eropa

dan Amerika Serikat yang menganggap bahwa bantuan yang diberikan oleh China pada hakikatnya merupakan usaha China untuk memperbaiki citranya yang rusak akibat Pandemi Covid-19 (Huaying, 2020).

Terlepas dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah China, terdapat satu permasalahan mencolok sebelum Covid-19 menjadi pandemic global. Permasalahan tersebut adalah persoalan krisis Hong Kong. Pada tahun 2019 lalu, Hong Kong menjadi tempat kerusuhan yang hebat karena Pemerintah China di Beijing dikabarkan akan “mengambil alih” pemerintahan dan politik di Hong Kong yang selama bertahun-tahun berbeda dari Beijing yang bercorak Sosialis-Komunis.

Pandemi Covid-19 ternyata menjadi momentum bagi Pemerintah China di Beijing untuk meredam protes terhadap upaya penguasaan Hong Kong. Pandemi Covid-19 mengakibatkan dilarangnya orang-orang untuk berkumpul dalam satu tempat dan menciptakan keramaian. Hal tersebut otomatis menjadikan demonstrasi pro-demokrasi Hong Kong menjadi terlarang. Pemerintah China bahkan diketahui telah menangkap beberapa tokoh-tokoh karena dinilai telah melanggar aturan tersebut. Namun uniknyanya, tokoh-tokoh yang ditangkap tersebut adalah para aktivis pro-demokrasi Hong Kong. Tidak kurang dari 15 pemimpin pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan oleh Pemerintah China. (Thiessen, 2020) Lebih jauh lagi, Pandemi Covid-19 ternyata menjadi momentum bagi Pemerintah China di Beijing untuk menerapkan undang-undang keamanan nasional yang baru yang memungkinkan Pemerintah di Beijing untuk menguasai Hong Kong sepenuhnya dan mengakhiri konsep “Satu Negara Dua Sistem” yang selama ini dijalankan di China. (Thiessen, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, kerangka analisis dan diskusi dapat dipahami bahwa terdapat indikasi adanya “Kapitalisasi Bencana” yang dilakukan oleh China dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Momen Pandemi Covid-19 dijadikan oleh China sebagai momentum untuk menunjukkan diri sebagai Negara yang cakap dalam penanganan krisis. Meskipun China mendapatkan banyak kritikan terkait tidak transparannya pengelolaan krisis disana sehingga hal ini memperburuk citra China. Untuk menangani hal ini, China kemudian memberikan bantuan yang cukup besar dalam skala global terutama bagi Negara-negara yang menjadi mitra perdagangan China. Pada sisi lain, momentum Pandemi Covid-19 telah menjadikan Pemerintah China mampu meredam kerusuhan yang terjadi di Hong Kong yang menuntut demokratisasi wilayah tersebut.

Tentu saja masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak disebutkan atau dielaborasi lebih jauh dalam tulisan ini. Namun itu semua harapannya adalah menjadi ruang bagi munculnya riset-riset baru dimasa depan terkait tema dari tulisan ini.

REFERENSI

- Biswas, A.K., dan Guan, A.E., (2020, Mei 21). *China and the fight against Covid-19*. Policy Forum, tersedia di [<https://www.policyforum.net/china-and-the-fight-against-covid-19/>] diakses pada 4 Juni 2020
- Carter, D.P., dan May, P.J. (2020), Making sense of the US Covid-19 pandemic response: A policy regime perspective. *Administrative Theory and Praxis*, 42(2), 265-277. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1758991>
- Chen, H., Huang, X., dan Li, Z., A content analysis of Chinese news coverage on Covid-19 and tourism, *Current Issues in Tourism*, 1-8. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1763269>
- Fletcher, E.R., (2020, Mei 18). *China Announces US \$ 2 Billion COVID-19 Initiative; US Assails China's Pandemic Response; WHO Decries Global "Amnesia" About Epidemic Lessons*. Health Policy Watch, tersedia di [[Interdependence: Journal of International Studies](https://healthpolicy-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- watch.org/china-announces-us-2-billion-covid-19-initiative/] diakses pada 30 Mei 2020
- He, K., dan Feng, H., *China's Bargaining Strategies for Peaceful Rise: Successes and Challenges*, *Asia Security*, 10(2), 168-187.
<http://dx.doi.org/10.1080/14799855.2014.914496>
- Huaying, B. (2020, Mei 8). *China's Daunting Post Covid Challenges*. *The Diplomat*, tersedia di [https://thediplomat.com/2020/05/china-daunting-post-covid-challenges/] diakses pada 4 Juni 2020
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. New York: Metropolitan Books
- Lee, P.K dan Chan, L.H. (2014), *China Joins Global Health Governance: New Player, More Medicines, and New Rules?* *Global Governance*, 20 (2014), 297-232.
- Li, H., dan Musiitwa, J. (2020, April 24). *'Coronavirus Diplomacy': China's opportune time to aid Africa*. *The Africa Report*, tersedia di [https://www.theafricareport.com/26750/coronavirus-diplomacy-chinas-opportune-time-to-aid-africa/] diakses pada 4 Juni 2020
- Mac Ginty, R., dan Peterson, J.H. *The Routledge Companion to Humanitarian Action*. London: Routledge
- Mitchell, J.N. (2016), *Transnational Organized Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation*. *Brawijaya Law Journal*, 3(2), 176-199.
- Thiessen, M.A., (2020, Mei 21). *China is using Covid-19 to throttle Hong Kong's pro-democracy movement*. *The Washington Post*, tersedia di [https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/21/china-is-using-covid-19-throttle-hong-kongs-pro-democracy-movement/]